



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAID SALIM
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 781734

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 17.5 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 52.000.000

1. MOBIL, XENIA R DELUXE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 600.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 98.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.360.600.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.360.600.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FANNY KARTIKA OKTAVIANI  
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN  
3. NHK : 716671

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	11.500.000
1. MOTOR, HONDA NC 12A1CF A/T / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 1S7 JUPITER MX / SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	8.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	54.862.265
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	74.362.265
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	135.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-60.637.735

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARIA CINDRA DEWI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 489700

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 319.000.000

1. Tanah Seluas 932 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 599 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,  
LAINNYA Rp. 13.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 240.500.000

1. MOTOR, HONDA REV0 FIT SOLO Tahun 2017, HADIAH Rp.  
5.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
235.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.608.400

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 597.108.400

**III. HUTANG** Rp. 162.600.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 434.508.400

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.